

Transformasi Kekuasaan Politik: Dari Sistem Tradisional Menuju Modernitas dalam Konteks Diplomasi Nusantara

Devi Amara^{1*}, Rani Simarmata², Irhas Fansuri Mursal³

^{1,2,3}Universitas Jambi

*Corresponding author, e-mail: depiamara9@gmail.com

Abstrak

Transformasi kekuasaan politik di Nusantara dari sistem tradisional ke modernitas penting dikaji untuk memahami karakteristik unik diplomasi Indonesia. Penelitian ini menguji hipotesis bahwa perubahan sistem politik menciptakan sintesis antara nilai tradisional dan prinsip modern dalam praktik diplomasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan sejarah, data primer diperoleh dari dokumen sejarah dan arsip diplomasi, sedangkan data sekunder dari literatur akademis. Hasil menunjukkan sistem kekuasaan tradisional berdasarkan legitimasi kosmologis dengan diplomasi simbolis melalui pernikahan dinasti dan pertukaran hadiah. Kolonialisme Eropa mengubah diplomasi menjadi kontraktual berdasarkan hukum. Pasca-kemerdekaan, Indonesia mengembangkan diplomasi Bebas Aktif yang memadukan nilai tradisional seperti musyawarah dengan prinsip kedaulatan modern. Temuan ini penting untuk memahami keunikan diplomasi Indonesia yang berbeda dari praktik diplomasi Barat, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan geopolitik kontemporer di tingkat regional dan global.

Kata Kunci: Diplomasi; Kolonialisme; Modernitas; Nusantara; Transformasi Politik.

Abstract

The transformation of political power in the archipelago from a traditional system to modernity is important to study in order to understand the unique characteristics of Indonesian diplomacy. This study tests the hypothesis that political system change creates a synthesis between traditional values and modern principles in diplomatic practice. Using a qualitative approach with historical comparison methods, primary data was obtained from historical documents and diplomatic archives, while secondary data was obtained from academic literature. The results show that the traditional power system was based on cosmological legitimacy with symbolic diplomacy through dynastic marriages and gift exchanges. European colonialism transformed diplomacy into a contractual system based on law. After independence, Indonesia developed Free and Active diplomacy, which combines traditional values such as deliberation with modern principles of sovereignty. These findings are important for understanding the uniqueness of Indonesian diplomacy, which differs from Western diplomatic practices, as well as its relevance in facing contemporary geopolitical challenges at the regional and global levels.

Keywords: Colonialism; Diplomacy; Modernity; Nusantara; political transformation.

How to Cite: Amara, D., Sinarmarta, R. & Mursal, I. F. (2026). Transformasi Kekuasaan Politik: Dari Sistem Tradisional Menuju Modernitas dalam Konteks Diplomasi Nusantara. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(3), 141-147.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©20256 by author.

Pendahuluan

Nusantara, yang merupakan kumpulan pulau terbesar di dunia, telah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan kekuasaan politik yang unik dan rumit sepanjang sejarahnya¹. Dari zaman kerajaan-kerajaan pelaut yang sukses dalam berdagang dan berhubungan secara diplomatik, sampai munculnya negara modern Indonesia, perjalanan ini menunjukkan hubungan antara warisan lokal dan kemodernan global yang sangat khas.

Sistem kekuasaan tradisional di Nusantara didasarkan pada konsep mandala, yang berarti kedaulatan yang berlapis, dan diplomasi keluarga, telah membentuk cara diplomasi di kawasan ini yang berbeda dari cara di Eropa. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, serta berbagai kesultanan di pulau-pulau lainnya tidak hanya berkuasa secara politik tetapi juga membangun jaringan diplomasi maritim yang canggih, menggabungkan perdagangan, agama, dan budaya.

Kedatangan kolonial Eropa pada abad ke-16 menandai waktu penting dalam perubahan ini. Sistem Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan gagasan kekuasaan terpusat dan birokrasi modern, tetapi juga menyebabkan perpecahan politik yang merusak sistem tradisional di Nusantara. Proses ini menciptakan campuran antara struktur kekuasaan kolonial dan cara hidup lokal yang unik.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa perubahan baru dalam kekuasaan politik di Nusantara. Negara Indonesia harus menciptakan sistem kekuasaan modern sambil menggabungkan berbagai tradisi politik dari ribuan pulau yang ada. Dalam hal diplomasi, Indonesia mengembangkan cara yang mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional Nusantara dan prinsip-prinsip diplomasi modern, seperti terlihat dalam konsep Bebas Aktif dan peran Indonesia dalam gerakan Non-Blok.

Era reformasi tahun 1998 menandai perubahan baru, di mana demokrasi dan pembagian kekuasaan menghadirkan dinamika baru dalam politik Indonesia. Diplomasi Nusantara sekarang harus menyesuaikan diri dengan tuntutan transparansi, partisipasi masyarakat, dan kerumitan hubungan internasional di dunia yang multikultural.

Penulisan ini mendalami tentang bagaimana perubahan kekuasaan politik di Nusantara—dari sistem tradisional hingga modern—telah membentuk karakter unik diplomasi Indonesia, serta pentingnya dalam menghadapi tantangan geopolitik baik di tingkat regional maupun global di abad ke-21.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan sejarah untuk menganalisis perubahan kekuasaan politik di Nusantara. Data primer diperoleh dari studi dokumen sejarah, arsip diplomasi, dan naskah-naskah kuno, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku-buku akademis mengenai sejarah politik dan hubungan internasional. Analisis dilakukan secara kronologis dengan membandingkan periode sebelum kolonialisasi, masa kolonial, dan setelah kemerdekaan untuk memahami kesamaan dan perubahan dalam praktik diplomasi di Nusantara.

Hasil dan Pembahasan

Kekuasaan Politik Tradisional Nusantara

Sistem kekuasaan politik di Nusantara pada masa lalu berlandaskan pada legitimasi yang bersifat kosmologis dan religius³. Raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan di dunia atau bahkan dianggap memiliki sifat ilahi. Di Jawa, ide wahyu keprabon menjadi simbol bahwa kekuasaan berasal dari restu Tuhan yang diberikan kepada seorang pemimpin. Sementara itu, di kawasan Melayu, konsep daulat menegaskan bahwa raja merupakan pusat ketaatan masyarakat, dan hukum adat serta larangan-larangan menguatkan struktur sosial. Dengan kata lain, kekuasaan dipahami tidak hanya dalam konteks politik, tetapi juga sebagai hal yang sakral, berkaitan dengan harmoni antara kosmos dan masyarakat

Struktur politik tradisional cenderung berbentuk mandala, yaitu sebuah sistem yang mengatur pusat dan pinggiran. Kerajaan sebagai pusat memiliki kekuasaan yang semakin lemah ketika jarak geografis semakin jauh. Ini menjelaskan mengapa batas-batas wilayah pada masa itu bersifat cair dan tidak kaku. Tidak ada garis batas yang jelas seperti negara-negara modern, melainkan lebih kepada jaringan pengaruh yang bisa diperkuat atau dilemahkan melalui diplomasi, perkawinan politik, atau perdagangan.

Dalam konteks ini, diplomasi tradisional lebih bersifat simbolis. Pernikahan antar-dinasti, pertukaran hadiah, serta upeti merupakan cara utama untuk menjaga hubungan antar kerajaan. Diplomasi tidak hanya dilihat dari segi kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat legitimasi politik. Sebagai contoh, Sriwijaya mengirimkan utusan ke Tiongkok dengan membawa barang-barang berharga, bukan hanya untuk tujuan perdagangan, tetapi juga untuk mendapatkan pengakuan simbolis dari kekaisaran Tiongkok⁶. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi Sriwijaya di antara kerajaan-kerajaan lain di wilayah Asia Tenggara.

Diplomasi Tradisional Nusantara: Antara Simbol dan Kekuasaan Diplomasi di Nusantara Tradisional

Diplomasi di Nusantara pada masa lalu terdiri dari tiga aspek utama. Pertama, aspek maritim dan perdagangan. Dengan posisi geografisnya yang strategis di jalur perdagangan global, diplomasi di Nusantara sangat terkait dengan penguasaan rute laut. Sriwijaya berhasil membangun kekuasaannya dengan mengendalikan Selat Malaka dan mempertahankan hubungan baik dengan Tiongkok. Majapahit, melalui ekspansi maritim yang dipimpin oleh Gajah Mada, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara ke dalam jaringan politik dan ekonomi.

Kedua, aspek simbolik dalam diplomasi. Banyak kerajaan di Nusantara yang memberikan penekanan pada ritual dalam hubungan diplomatik. Contohnya, Kerajaan Melayu di Semenanjung secara rutin mengirim bunga emas dan perak kepada Siam sebagai tanda persahabatan serta penghormatan terhadap kekuasaan Siam. Praktik ini tidak dianggap sebagai penyerahan kedaulatan, tetapi sebagai bagian dari sistem diplomasi tradisional yang menekankan pada keharmonisan.

Ketiga, diplomasi koersif yang menggunakan kekuatan militer. Majapahit melakukan ekspedisi Pamalayu di akhir abad ke-13, yang secara politis berfungsi sebagai pernyataan diplomasi militer kepada kerajaan-kerajaan di Sumatra. Melalui ekspedisi ini, Majapahit tidak hanya meneguhkan dominasi politiknya, tetapi juga melindungi rute perdagangan yang vital untuk perekonomian kerajaannya.

Pengaruh Kolonialisme: Dari Diplomasi Simbolik ke Diplomasi Kontraktual

Kedatangan bangsa Eropa mulai abad ke-16 membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan di Nusantara. Suku bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris memperkenalkan cara pandang yang berbeda dari sistem yang sudah ada. Mereka menghadirkan konsep kedaulatan wilayah dan pendekatan diplomasi berdasarkan kontrak hukum.

Salah satu pengaruh paling besar dari kolonialisme adalah transisi dari diplomasi yang bersifat simbolis menjadi diplomasi yang tidak setara. Sebagai contoh, VOC menerapkan kesepakatan dengan kerajaan-kerajaan setempat, seperti Perjanjian Bongaya tahun 1667 dengan Kerajaan Gowa⁹. Kesepakatan ini dibuat berdasarkan hukum Eropa, bukan tradisi lokal, sehingga sering kali merugikan pihak kerajaan.

Kolonialisme juga membawa perubahan terhadap struktur politik dalam negeri. Para raja yang sebelumnya memegang kekuasaan penuh, perlahan-lahan dijadikan sebagai simbol tanpa kekuasaan nyata. Otoritas administratif diambil alih oleh pegawai kolonial. Sistem birokrasi yang modern diperkenalkan untuk menggantikan struktur

tradisional dan kosmologi. Dengan demikian, kolonialisme tidak hanya berdampak pada praktik diplomasi luar negeri, tetapi juga secara mendasar mengubah lanskap politik di Nusantara.

Menuju Modernitas: Diplomasi dan Perjuangan Kemerdekaan

Proses menuju modernitas semakin jelas terlihat pada awal abad ke-20 ketika semangat nasionalisme mulai muncul. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan PNI menandai munculnya kesadaran baru tentang identitas bangsa dan negara¹¹. Diplomasi tidak lagi dianggap sekadar hubungan antar-kerajaan, tetapi sebagai perjuangan bangsa untuk mendapatkan pengakuan setara dengan negara lain. Selama masa revolusi kemerdekaan (1945–1949), diplomasi Indonesia bergerak dalam dua aspek. Di satu sisi, diplomasi internal dilakukan untuk mencapai kesepakatan di antara kelompok nasionalis, Islam, dan tradisional. Di sisi lain, diplomasi eksternal dijalankan dengan mengirimkan perwakilan ke PBB, melobi negara-negara di Asia dan Timur Tengah, serta berpartisipasi dalam forum internasional. Pendekatan diplomasi ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki fase baru di mana legitimasi politik tidak lagi berakar dari kosmologi atau tradisi, melainkan dari prinsip kedaulatan rakyat dan hukum internasional.

Analisis Kritis: Dialektika Tradisi dan Modernitas

Transformasi kekuasaan politik di Nusantara tidak dapat dipahami sebagai suatu proses yang berjalan secara lurus. Sebaliknya, yang terjadi adalah pertukaran antara tradisi dan modernitas. Di satu sisi, modernitas memperkenalkan prinsip-prinsip rasional, hukum yang tertulis, dan kedaulatan wilayah. Sementara itu, warisan tradisi masih ada dan memengaruhi praktik politik saat ini.

Berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, seharusnya pemimpin modern mendapatkan legitimasi melalui undang-undang dan pemilihan umum. Namun, banyak pemimpin politik di Indonesia yang tetap mengandalkan simbol-simbol tradisional untuk memperkuat citra mereka, contohnya dengan menggunakan gelar adat atau melakukan ritual budaya saat resmi menjabat.¹³

Dalam aspek diplomasi, meskipun diplomasi modern didasarkan pada hukum internasional, praktik patronase dan hubungan pribadi masih berperan penting. Hal ini menunjukkan bahwa warisan diplomasi tradisional masih relevan, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dalam hal hubungan domestik dan internasional, Indonesia masih terjebak dalam dilema antara mempertahankan nilai-nilai tradisional seperti musyawarah dan harmoni dengan tuntutan realitas politik global yang sering kali keras

dan praktis. Pertukaran ini menciptakan ciri khas diplomasi Indonesia yang berbeda dari negara lainnya.

Kesimpulan

Transformasi kekuasaan politik dari sistem tradisional ke modernitas dalam konteks diplomasi di Nusantara adalah sebuah proses panjang yang mencerminkan perkembangan sejarah, interaksi antarbudaya, serta perjuangan antara nilai-nilai lama dengan tantangan baru. Dari awal yang didasarkan pada legitimasi kosmologis yang melibatkan adat, agama, dan simbol-simbol spiritual, kekuasaan politik di Nusantara beralih ke sistem modern yang lebih menekankan pada hukum, konstitusi, dan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Diplomasi, sebagai alat dari kekuasaan, juga mengalami perubahan signifikan, dari bentuk simbolis dan ritual ke format yang lebih kontraktual dan legal, hingga akhirnya berevolusi menjadi diplomasi modern yang berlandaskan kesetaraan antara negara.

Namun, perubahan ini tidak berarti bahwa warisan tradisional sepenuhnya hilang. Sebaliknya, jejak-jejak nilai tradisional tetap ada dan bahkan terus mempengaruhi praktik diplomasi Indonesia saat ini. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, kesopanan budaya, serta pendekatan yang harmonis masih menjadi karakteristik yang membedakan diplomasi Indonesia dari bangsa lain. Dengan demikian, transformasi kekuasaan politik di Nusantara seharusnya dipahami bukan sebagai perubahan total, melainkan sebagai proses dialektika yang menciptakan sintesis antara tradisi dan modernitas.

Daftar Pustaka

- Abdullah, T., & Surjomihardjo, A., Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 45–67.
- Alisjahbana, S. T., Sejarah Perdagangan di Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1966), hlm. 101–135.
- Anwar, R., Diplomasi Indonesia: Sejarah dan Dinamika (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 23–55.
- Kartodirdjo, S., Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 15–42.
- Kartodirdjo, S., Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 78–112.

- Lapian, A. B., *Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad Moedjanto, G., Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 33–76.
- Poeponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (eds.), *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II Zaman Kuno* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 211–250.
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern 1200–2004* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 45–102.
- Sartono, K., *Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hlm. 5–28.
- Slamet-Velsink, I., *Islamisasi Jawa: Wali Songo, Politik, dan Kekuasaan di Jawa Abad XV–XVI* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), hlm. 97–140.
- Supomo, S., *Sejarah Nusantara: Dari Prasejarah hingga Modern* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 177–210.
- Syamsuddin, H., *Indonesia dalam Arus Sejarah: Kolonialisme dan Nasionalisme* (Jakarta: PT Gramedia, 2007), hlm. 66–118.